

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan hasil evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Rancang bangun Aplikasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan Aspirasi dan Pengaduan masalah kepada DPRD Kab.TTU dengan lebih efektif dan efisien.
2. Aplikasi penyampaian aspirasi masyarakat ini membantu pihak DPRD Kab.TTU khususnya Komisi DPRD dalam menampung Aspirasi Masyarakat.
3. Sistem mampu menjalankan semua prosedur yang dimasukkan oleh *user* dalam melakukan registrasi, menyampaikan aspirasi dan mengakses informasi-informasi yang ada dalam sistem.

6.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam Aplikasi Penyampaian Aspirasi DPRD Kabupaten TTU berbasis Web ini yaitu diharapkan kedepannya dapat memberikan informasi lain yang berkaitan dengan instansi secara lengkap dan lebih terperinci, juga dapat menambahkan fungsi-fungsi lain yang bermanfaat, yang belum terdapat dalam sistem. Sistem ini juga di harapkan kedepannya dapat menyaring setiap aspirasi yang di sampaikan oleh *user* sehingga dapat di ketahui oleh *admin* jika sebelumnya aspirasi tersebut sudah di sampaikan dan sudah di proses agar *admin* tidak perlu lagi menanggapi aspirasi tersebut. Pihak instansi juga kedepannya dapat melakukan sosialisasi mengenai Aplikasi Penyampaian

Aspirasi ini kepada masyarakat Kabupaten TTU agar manfaatnya dapat terasa sampai kepada masyarakat luas, karena inovasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pengajuan Aspirasi dan pengaduan. Sosialisasi dapat berupa iklan layanan masyarakat, membentuk komunitas, ataupun seminar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, K. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik Yogyakarta. Pembaharuan*, 1-5.
- Sundari, I. P., Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2017). *Akuntabilitas Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat*. VII(1), 63–70.
- Ali Fikri, I. A. (2019). Pengembangan Sistem Informasi Aspirasi *Online* Berbasis Web Menggunakan Pemodelan *Reuse-Oriented Development* (Studi Kasus: DPM Universitas Brawijaya). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 1-10.
- Hardiansah, I. S. (2017). Rancangan Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat Dengan Metode *Extreme Programming* (Studi kasus: Kabupaten Ngawi) . *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2017*, 1-6.
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Legalitas.
- Luna Reyes, L., & Gil-Garcia, J. (2011). Using instutional theory and dynamic *simulation* to understand complex e-Goverment phenomena. *Goverment Information Quartely*, 329-345.
- Pressman, R. (2015). Rekayasa Perangkat Lunak. *Pendekatan Praktisi Buku I*, 1-3.
- Rini Rachmawati, A. N. (2018). Pemanfaatan Aplikasi Lapor Sleman Sebagai Pelayanan Pengaduan Di Kabupaten Sleman. *Aplikasi pelapor*, 1-11.
- Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.